
Bantuan Likuiditas Bank Sentral dalam Menghadapi Krisis Keuangan

Sebelum dilakukan pembahasan lebih rinci berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menghadapi krisis keuangan maka perlu disepakati definisi krisis keuangan dengan mengacu kepada beberapa publikasi dari berbagai sumber ciri-ciri terjadinya krisis keuangan di suatu negara:

- Kekurangan likuiditas yang besar dalam jangka pendek namun tidak bisa dipenuhi dengan segera (Schwartz, 1985; Miron, 1986; Wolfson, 1986).
- Banyak kredit diberikan pada saat perekonomian *boom* tetapi tak terbayar sehingga diperlukan eksekusi (Veblen, 1904; Michell, 1941).
- Para peminjam yang biasanya mudah mendapat kredit dengan persyaratan tertentu tidak dapat lagi meminjam dari bank dengan persyaratan yang sama (Guttentag and Herring, 1984; Manikov, 1986).
- Penurunan nilai aset dari bank yang relatif besar mengakibatkan *insolvency* yang diikuti *collapse*-nya beberapa bank bahkan terjadi *bank runs* (Federal Reserve Bank of Sanfransisco, 1985)

Kondisi tersebut biasanya diatasi dengan likuidasi, *merger* dan restrukturisasi perbankan. Efek terhadap ekonomi secara umum biasanya berupa penurunan output dan problem neraca pembayaran.

Permasalahan dalam skala mikro, dapat menyebabkan ketidakstabilan sistem perbankan secara umum sebagai akibat ketidakpercayaan para deposan terhadap sistem perbankan atau permasalahan keuangan di salah satu bank dapat menyebabkan permasalahan keuangan bank

Ardhayadi Mitroatmodjo, SE.Akt, MA.

Lahir di Yogyakarta, 2 Februari 1952.
Menyelesaikan S1 FE-UGM jurusan Akuntansi (1977) dan *Master of Art in Banking*, American University (1986) sekarang Direktorat Pemeriksaan Bank Indonesia Jakarta

lainnya sebagai akibat besarnya *interbank loans*. Hal ini mudah sekali terjadi dalam industri perbankan yang kurang transparan sehingga pengguna bank menghadapi kesulitan dalam melakukan indentifikasi mana bank yang baik dan mana yang memiliki resiko relatif tinggi.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai *treatment* yang dapat diterapkan dalam mengurangi dampak dari krisis, baik secara teori maupun praktek yang dilakukan oleh berbagai negara dan mencoba melakukan simulasi dengan menerapkan teori efek multiplier dengan menggunakan data perbankan tahun 1997/98.

Teori Dalam Mengatasi Krisis Keuangan

Krisis keuangan dapat terjadi dari berbagai sebab yang masing-masing mempunyai karakteristik khusus, dengan demikian pendekatan untuk penyelesaiannya akan berbeda pula. Sundarajan (1991) berpendapat bahwa dalam penyelesaian krisis keuangan tidak terlepas dari sumber terjadinya krisis, yang secara umum dapat dibagi menjadi tiga kelompok: (1) permasalahan di sektor non-finansial yang memicu terjadinya krisis; (2) faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran kredit; (3) penyebab yang spesifik dan krisis itu sendiri.

Permasalahan dari sektor non finansial sering sekali memicu krisis keuangan yang terjadi sebagai akibat laju pertumbuhan sektor riil terlalu cepat sehingga tidak diimbangi oleh pertumbuhan sumber pendanaan. Bank biasanya akan melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga yang mengakibatkan terjadinya peningkatan *non-performing loan*. Hal yang demikian masih dapat diatasi dengan dana dari bank sentral sebagai *the lender of the last resort* atau kredit secara langsung terhadap beberapa peminjam. Hal ini dapat dilakukan di Indonesia sebelum masa krisis dengan adanya fasilitas diskonto ditahun 1980-an.

Tak seimbangny jumlah penawaran

dan permintaan kredit juga dapat memicu krisis keuangan di suatu negara. Kondisi ini terjadi bila permintaan kredit tidak elastis dengan suku bunga sehingga berapa pun suku bunga kredit yang dipatok oleh bank maka tetap akan diambil. Sedangkan penawaran kredit yang sangat elastis terhadap tingkat suku bunga biasanya terjadi jika terjadi eksess permintaan karena industri baru dalam tahap *boom*. Dengan demikian tidak tersedianya kredit dalam masa *boom* akan menyebabkan siklus dunia usaha memasuki tahap penurunan. Bank dapat meningkatkan sumber dana dari deposito dengan meningkatkan suku bunga, namun keputusan akan berakibat kenaikan suku bunga kredit. Hal demikian akan mengakibatkan hanya nasabah dengan tingkat risiko yang relatif tinggi akan meminjam ke bank. Dengan demikian, risiko untuk *default* dari peminjam akan meningkat pula. Teori demikian disebut *market failure*, teori yang sebenarnya masih dapat diterima apabila terdapat subsidi atau *debt bail-out* oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat dilakukan dengan pengawasan yang lebih ketat, garansi kredit dari pemerintah atau pinjaman dalam rangka *the lender of the last resort*.

Penyebab yang ketiga adalah terlalu ketatnya kebijakan ekonomi makro. Otoritas moneter melakukan kontrol terhadap uang beredar secara ketat dan cadangan minimum (*reserve requirement*) yang cukup tinggi. Bank terpaksa menjual kredit untuk mendapatkan likuiditas dengan harga yang relatif murah, terjadi peningkatan suku bunga untuk mengurangi kredit serta meningkatkan *insolvency* dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Kalau ini terjadi maka krisis perbankan bersumber dari kebijakan ekonomi makro dan struktur perbankan. Untuk mengatasi hal demikian maka dapat dilakukan dengan restrukturisasi pinjaman dan modal bank itu sendiri.

Setelah mengetahui penyebab dari adanya krisis keuangan maka selanjutnya akan dibahas kebijakan yang dapat diambil oleh

pemerintah secara garis besar dapat dibagi menjadi: (1) Kebijakan darurat berupa penerapan fungsi *the lender of the last resort*; (2) Kebijakan berkaitan dengan bank bermasalah; (3) Kebijakan yang membantu para peminjam; (4) Restrukturisasi dan reformasi perbankan.

Kebijakan darurat

Kebijakan ini untuk menstabilkan sistem keuangan secepat mungkin dengan memberikan pinjaman darurat. Mekanismenya dapat berupa pinjaman langsung ke bank untuk menggantikan penarikan deposito para nasabah yang ditarik untuk menjaga likuiditas bank. Dalam kondisi tertentu pemerintah perlu membuat peraturan tersendiri untuk membentuk lembaga yang khusus menyalurkan *emergency credit* kepada bank bermasalah seperti di Filipina dan Thailand. Intervensi bank sentral terhadap manajemen bank juga dapat membuahkan hasil, seperti di Argentina, Chili, Malaysia dan Spanyol. Penerapan penjaminan deposito juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*) terhadap dunia perbankan seperti yang terjadi di Argentina, Chili dan Indonesia. Namun, tak semua bank yang mendapat bantuan pinjaman darurat dapat sehat kembali sehingga diperlukan kebijakan lanjutan bagi bank yang masih bermasalah.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah telah membantu bank yang mengalami saldo negatif di BI dengan memberikan bantuan likuiditas yang dikenal dengan nama Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Namun demikian, memang tidak semua bank telah menerima BLBI dapat kembali beroperasi sehingga terdapat beberapa bank yang kemudian ditutup.

Kebijakan Terhadap Bank Bermasalah.

Jika kebijakan ini diterapkan di suatu negara, maka tergantung peraturan perundang-undangan, struktur industri perbankan, *deposit insurance* dan besarnya

kerugian bank. Di Argentina semua bank bermasalah dilikuidasi meskipun bank sentral berhak melakukan *merger* bank bermasalah. Sedangkan di Thailand sesuai kondisi bank bersangkutan, ada yang dilikuidasi, *merger*, rekapitalisasi dan diberikan bantuan likuiditas baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah Chili akhirnya melikuidasi bank kecil dan merekapitalisasi bank yang secara sistematis penting bagi perekonomian. Pemerintah Filipina menutup bank-bank kecil dan mengambil alih (*take over*) bank-bank yang besar dengan bantuan dari bank sentral. Sedangkan di Spanyol, lembaga penjamin simpanan akhirnya membeli saham bank bermasalah dengan harga nominal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *legal framework* mempengaruhi distribusi kerugian antara pemilik bank, deposan, debitur dan pemerintah. Pemilik akan menderita kerugian cukup besar jika banknya ditutup atau diambil alih oleh pemerintah dengan harga nominal dan kerugiannya akan lebih kecil apabila diperbolehkan untuk tetap memiliki bank dan mendapat subsidi pemerintah atau bank sentral. Di Indonesia sendiri, setelah melakukan *due diligence* dengan dibantu oleh *international consulting firm*, BI telah melakukan penutupan beberapa bank yang tidak prospektif untuk dikembangkan lagi serta dampak negatif bagi perekonomian secara umum relatif kecil. Beberapa bank tetap dipertahankan dengan rekapitalisasi dan restrukturisasi.

Restrukturisasi dan Reformasi Perbankan

Terjadinya krisis menunjukkan bahwa peraturan dan sistem keuangan yang ada kurang mampu mengantisipasi perubahan yang akan terjadi sehingga diperlukan perbaikan. Dengan demikian, restrukturisasi dan reformasi sistem keuangan diperlukan setelah krisis terjadi. Di Thailand, fungsi pengawasan bank sentral diperluas untuk mencakup lembaga keuangan non-bank dan

membatasi konsentrasi pemilikan. Di Chili, regulasi baru memberikan definisi lebih jelas tentang pembatasan pemberian kredit terhadap individu dengan mempertimbangkan *interlocking* dalam kepemilikan, sistem perhitungan *ranking*, kebutuhan modal minimum yang lebih ketat dan *disclosure* kepada publik. Di Indonesia sedang dilakukan perubahan UU Bank Sentral Tentang independensi BI dan peningkatan sistem pengawasan bank dengan mengacu kepada standar internasional.

Latar Belakang Perlunya Bantuan Likuiditas Bank Sentral.

Bantuan likuiditas ditujukan untuk menghindari pengaruh yang lebih luas akibat terjadinya disintermediasi bank, kerugian yang mengakibatkan turunnya nilai modal serta menghindari bank dari kebangkrutan (*bankruptcy*). Jadi, para pengambil kebijakan (*policy maker*) seringkali memberikan argumen bantuan likuiditas ini diperlukan untuk menjaga kesehatan sistem perbankan dan ekonomi. Alasan lain yang lebih rinci:

- Tidak dipenuhinya pencairan kredit atas komitmen yang sudah disepakati (antara bank dan pihak perusahaan) dan tidak berfungsinya sistem pembayaran akan menyebabkan terjadinya stagnasi dalam kegiatan ekonomi. Kerugian yang diderita oleh bank akan menghambat bank dalam menyalurkan kredit dan apabila bank ditutup, maka perusahaan yang mengandalkan kredit dari bank akan berhenti beroperasi.
- Bank sangat rentan terhadap terjadinya permasalahan mengingat perubahan nilai aset maupun *liabilities* sulit diprediksi sehingga pengaruh terhadap rugi laba bank dapat terjadi sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan nilai jual atas pos-pos neraca terutama yang berkaitan dengan posisi *foreign exchange*. Terjadinya perubahan nilai tukar mata uang akan mengakibatkan *insolvency*

dan menyebar ke sektor lain yang berhubungan dengan bank yang dimaksud.

- Bantuan likuiditas dapat mengurangi kerugian yang diderita bank dan nasabah sebagai akibat krisis serta menghindari ketidakpercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Teori Efek Multiplier di Masa Krisis

Untuk menghindari krisis yang berkepanjangan, bank harus tetap menjalankan jasa pelayanannya. Terhentinya bank dalam menjalankan fungsinya akan menyebabkan terhentinya roda perekonomian karena nasabah tidak dapat lagi menarik dana dari bank untuk keperluan usahanya. Untuk menggambarkan hal yang demikian dapat kita gunakan *multiplier framework* dari Capie (1999) yang mengatakan bahwa untuk menjaga kestabilan ekonomi, maka pelayanan jasa perbankan harus dipelihara keseimbangannya. Fungsi utama bank adalah sebagai *money multiplier* dalam perekonomian yang dapat dituangkan dalam persamaan sebagai berikut:

$$M = mB$$

Dimana:

- M : *money stock* di masyarakat untuk menjalankan perekonomian
- m : *money multiplier*
- B : *base money* atau kewajiban bank sentral terhadap bank umum dan masyarakat.

Untuk menjaga kestabilan ekonomi maka fungsi bank dalam pelaksanaan *money multiplier* perlu dijaga.

Dalam kondisi krisis, terdapat kecenderungan bahwa deposan akan menarik uangnya akibat ketidaktahuannya tentang kondisi bank penerima deposito karena tak jelasnya informasi. Di lain pihak bank juga

cenderung untuk meningkatkan *cash reserve*-nya untuk berjaga-jaga terjadinya *bank runs*. Fungsi bank sentral diantaranya perlu menjaga keseimbangan tersebut sehingga fungsi multiplier perbankan tidak terganggu dalam memelihara jalannya roda perekonomian. Jadi, peningkatan keinginan masyarakat untuk memegang uang kartal dapat diukur dengan rasio uang kartal dengan jumlah deposito (C/D) akan meningkat dan rasio *cash reserve* terhadap deposito di bank-bank juga akan meningkat (R/D). Peningkatan kedua unsur ini akan menghambat proses multiplier di perbankan sebagai salah satu proses perekonomian. Menurut Capie (1999) pengaruh terhadap multiplier di perbankan dapat dijabarkan sbb:

$$M = \frac{1 + C/D}{C/D + R/D}$$

C = uang kartal

R = *cash reserves*

D = *deposits*

$m_t > m_{t+1}$ apabila $[C/D]_t > [C/D]_{t+1}$ dan $[R/D]_t > [R/D]_{t+1}$

Turunnya efek multiplier akan menurunkan *money stock* (M) yang mengganggu perekonomian sehingga harus dijaga agar multiplier perbankan tetap stabil. Dalam keadaan krisis tentunya akan sulit untuk mengembalikan fungsi multiplier kepada level sebelum krisis, namun demikian usaha yang dilakukan hanya dapat mengurangi atau

memperlambat turunnya fungsi multiplier perbankan dengan menambah *base money*. Cara penambahannya dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya dengan bantuan likuiditas kepada bank terutama bank-bank yang memiliki dampak relatif besar terhadap perekonomian jika bank akan ditutup.

Angka multiplier menunjukkan adanya penurunan pada saat terjadi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yaitu pada akhir 1997 dan pertengahan 1998 (lihat tabel 1). Jika intervensi BI tidak terjadi maka angka multiplier ini akan cenderung menurun mengingat kecenderungan masyarakat untuk menyimpan uang kartal meningkat disertai pula keinginan bank untuk menyimpan uang kas yang berlebih.

Praktek Penerapan bantuan likuiditas oleh Bank Sentral di beberapa negara.

Sebagian besar negara di dunia memberikan berbagai fasilitas agar fungsi intermediasi bank tetap berjalan, hanya pendekatannya saja yang berbeda. Beberapa negara membentuk lembaga penjamin deposito untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Di Kanada, Inggris dan Amerika, pemerintah memberikan kebebasan industri perbankan untuk mengelola lembaga tersebut. Sedangkan di Perancis, Jerman dan Belanda pemerintah mendukung secara tidak langsung atas pelaksanaan lembaga penjamin simpanan dengan ikut dalam penyertaan modal. Tetapi ada pula beberapa negara yang terlibat

Tabel no.1
Multiplier Perbankan Indonesia

Periode	Kas	Uang kartal	Deposito	Rasio uang kas dan deposito	Rasio uang kartal dan deposito	Efek Multiplier
Jun-97	4,066	23,754	246,571	1.65	0.96	0.75
Des-97	5,274	28,424	254,998	2.07	1.11	0.66
Jun-98	7,911	44,924	360,946	2.19	1.24	0.65
Des-98	7,111	41,394	441,399	1.61	0.94	0.76

Sumber: Bank Indonesia

langsung dalam administrasi lembaga dimaksud seperti di Belgia dan Jepang.

Secara umum Badan Otoritas Moneter akan mem-back-up bank-bank yang mengalami permasalahan likuiditas sesuai ketentuan masing-masing negara. Pada dasarnya ada dua cara yang dapat dilakukan yaitu pemerintah dapat memberikan bantuan sementara melalui *discount window* yang prosedurnya diformalkan dan bantuan untuk jangka panjang yang pelaksanaannya berdasarkan kebijakan pada saat itu (Dale, 1994). Di Belgia dan Jerman, bantuan likuiditas diberikan melalui lembaga yang dibentuk bersama bank sentral dan bank-bank umum serta dapat diberikan oleh salah satu bank tanpa atau dengan bantuan bank sentral. Sebagai contoh Hongkong dan *Shanghai Bank* telah melakukan cara ini, begitu pula yang pernah dilakukan oleh *Bank of Tokyo* di Jepang. Sedangkan di Inggris, bank anggota kliring terlibat juga dalam penyelamatan bank-bank bermasalah dalam krisis di bank-bank sekunder pada tahun 1973-1975. Di Italia, beberapa bank besar telah menyelamatkan *Banco Ambrosiano* pada tahun 1982.

Terdapat beberapa negara yang tak memiliki bank sentral namun fungsi *the lender of the last resort* tetap dijalankan seperti di Hongkong terdapat *Government's Exchange Funds*. *Monetary Authority of Singapore (MAS)* memiliki wewenang yang dilindungi undang-undang untuk memberikan bantuan likuiditas kepada bank lokal.

Bagi negara-negara yang sudah menerapkan lembaga penjamin simpanan maka kesulitan keuangan yang terjadi di bank dapat ditangani lembaga tersebut. Namun bank sentral dapat mem-bail-out lembaga penjamin simpanan jika mengalami *insolvency* dalam menjalankan fungsinya seperti terjadi di

Amerika pada tahun 1980-1983. Lembaga yang menjamin (*Federal Savings and Loan Insurance Corporation* atau *FSLIC*) dinyatakan *insolvent* pada tahun 1987 dengan jumlah defisit sebesar USD 3 milyar. Akhirnya, pemerintah mengeluarkan obligasi untuk merekapitalisasi FSLIC sebesar USD 18 milyar. Pada tahun 1988, *General Accounting Office (GAO)* memperkirakan bahwa biaya untuk menyelesaikan 300 *thrift* yang bermasalah sebesar USD 19 milyar dan membengkak menjadi USD 100 milyar pada akhir 1988. Akhirnya biaya yang diperlukan sebesar USD 300 milyar (Ludwig, 1994).

Kesimpulan

Bantuan likuiditas untuk bank-bank bermasalah dalam masa krisis perlu dilakukan untuk menjaga kontinuitas roda perekonomian. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemberian bantuan likuiditas dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dimasing-masing negara. Terdapat beberapa negara membentuk badan khusus yang dilakukan untuk itu atau melalui lembaga penjamin simpanan bahkan dapat langsung diberikan melalui fasilitas antara lain merger, akuisisi maupun rekapitalisasi.

Dalam kasus Indonesia, penerapan multiplier teori membuktikan bahwa fungsi multiplier bank-bank menurun pada saat krisis meskipun sudah diberikan bantuan likuiditas. Tidak diberikannya bantuan likuiditas (ditutupnya bank bermasalah) akan membuat multiplier efek dari bank-bank akan semakin menurun dan pada akhirnya akan mengganggu perekonomian. Biaya yang dikeluarkan untuk bantuan likuiditas masih kecil dibandingkan dengan beban pemerintah akibat penerapan *blanquet guarantee* jika bank tersebut ditutup.

Kasus-kasus kegagalan bank (Cases of Bank Failures)

No	Nama Bank/Tahun	Masalah/Penyebab	Akibat	Solusi yang diterapkan
1.	Bankhaus Herstatt (Jerman Barat/1974)	<ul style="list-style-type: none"> *Kegagalan memenuhi kewajiban dalam transaksi forex spot yang melibatkan perbankan internasional (<i>settlement risk</i>) *Fraud dalam pembukuan yang lambat terdeteksi. 	<ul style="list-style-type: none"> * Bankhaus Herstatt diperintahkan Bundesbank untuk ditutup 26 Juni 1974. * Kerugian lebih dari USD 450 juta. * Kesulitan likuiditas bank Italia dan Jepang. * Rush di bank-bank kecil di Jerman 	<ul style="list-style-type: none"> * Bail-out oleh Bundesbank dan bank-bank utama Jerman (Desember 1971) dengan kondisi; - Bank Jerman memperoleh 45% dari klaim. - Bank asing 55%. - Kreditur lain 65%. - Nasabah kecil samapai dengan \$8.000 dibayar 100%. * Preventif, berupa pengetatan regulasi, pembentukan Liquidity Consortium Bank, memperkuat skim deposit Protection, memperluas wewenang lembaga pengawas bank dalam menangani kegagalan bank. Hal penting dalam kasus ini: <ul style="list-style-type: none"> * Pelanggaran prudential regulation melalui rekayasa pembukuan sulit dideteksi secara dini oleh authority

2.	Franklin National Bank (USA/1974)	<p>FNB dinyatakan insolven pada 8 Oktober 1974 karena :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rasio utang yang berlebihan. * Misalokasi pendanaan dan penjualan obligasi yang spekulatif. * Kualitas aset yang buruk. * Ketergantungan yang tinggi pada dana pinjaman (bukan deposit). * Kerugian transaksi valas. 	<p>Sebagai bank terbesar ke-20 di Amerika (total aset USD 50 milyar), kejatuhan FNB menyebabkan gangguan pada sistem keuangan.</p>	<p>Program penyelamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bantuan likuiditas dari Federal Reserve (FR) mencapai USD1,7 milyar. * FR mengambilalih kewajiban valas FNB untu meredakan ketegangan pasar. * Sebagian besar bantuan likuiditas FR digunakan FNB untuk menutup shortfall pendanaan cabang London untuk menjaga kepercayaan internasional. <p>Hal penting dalam kasus ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Kewajiban FNB yang diambilalih FR sangat besar, demi menjaga kepercayaan pasar internasional
3.	Banco Ambrosiano (Italia/1982), bank swasta terbesar dengan deposit USD 6 milyar	<p>Kredit bermasalah sebesar USD 1,4 milyar yang disalurkan melalui cabangnya di Amerika Latin memicu rush BA di Luxemburg.</p>	<p>Bank of Italy menolak membail-out dana nasabah di luar Italia (BA Luxemburg), sementara authority Luxemburg juga menolak bertanggung jawab karena BA didaftarkan sebaga holding co., bukan bank.</p>	<p>Program Penyelamatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Bank of Italy mengkordinir konsorsium pemberi bantuan likuiditas yang terdiri dari 7 bank domestik. *Pembentukan bank baru dengan modal awal dari dana konsorsium guna mengambil alih bisnis dan

				<p>kewajiban BA terhada para depositor.</p> <p>Hal penting dari kasus ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Tidak adanya kordinasi dan kerja sama antar supervisor authority menyangkut bank dengan operasi internasional. Hal ini memicu pembentukan <i>Basle Committee on Bank Regulations and Supervisor Practise</i>.
4.	Kasus Perbankan Kecil dan menengah di Inggris (1973-1975)	<p>Sekitar 30 bank kecil/menengah mengalami kesulitan likuiditas karena memburuknya kualitas aset secara umum.</p>	<ul style="list-style-type: none"> * Kepercayaan pelaku pasar keuangan di London terancam merosot. * Ditutupnya cabang London dari sebuah bank Israel.Sementara Bank of Israel menolak bertanggung jawab atas dana nasabah cabang London. 	<p>Bank of England meluncurkan program penyelamatan yang disebut Lifeboat:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Menyediakan bantuan likuiditas * Mengambil alih satu bank domestik karena adanya outstanding Eurobond dalam portofolionya . <p>Hal penting dari kasus ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Problem perbankan menjadi sulit ditangani jika telah melewati batas negara dan hukum.

5.	Barings (Inggris/1995), bank spesialis dalam merger dan akuisisi, berdiri tahun 1762.	* Kewajiban yang excessive dalam transaksi derivatif (mencapai GBP800juta) yang dilakukan dealernya, Nick Leeson, via cabang Singapore	* Potensi kerugian akibat transaksi derivatif yang begitu besar mengakibatkan kebangkrutan	<p>Program penyelamatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> * Bank of England bersedia memail-out tapi menolak menggunakan dana publik. * Barings diambil alih oleh ING Bank dari Belanda, sebuah Bank assurance (gabungan bank dan asuransi) Hal penting dari kasus ini; * Kelemahan pengawasan intern oleh Barings London terhadap aktivitas cabangnya di Singapore. * Adanya kode rekening yang kurang jelas dalam pembukuan Barings sehingga dapat digunakan untuk menyembunyikan potential loss.
----	---	--	--	---

Daftar Pustaka

Ludwig, E.A., (1994), "Supervising an Evolving Industry in Federal Reserve", Bank of Chicago, Conference Proceeding on the Decline (?) Role of Banking, The 30 Annual Conference on Bank Restructure and Competition, May 9-2.

Capie, F., (1999), "Evolution of the Lender of the Last Resort", London: City University Business School, April.

Dale, R., (1984), "The Regulation of International Banking", Cambridge: Woodhead-Faulker, Ltd, pp. 141-70.

Federal Reserve Bank of Sanfransisco, (1985), "The Search for Financial Stability: The Past Fifty Years", Proceeding of a conference held June 23-25.

Fischer, Stanley, (1999), "On the Need for an International Lender of the last Resort", IMF.

Guttentag, J. and Richard Herring, (1984), "Credit Rationing and Financial Disorder", Journal of Finance, Vol.39, December, pp 1-37.

Manikow, N.G., (1986) "The Allocation of Credit and Fomamco; Collapse", National Bureau of Economic Research (NBER), Working Paper No. 1786, pp1-19.

Miron, W.C., (1941), "Business Cycle and Their Causes, Barkeley, California: University of California Press.

